

	PT. GENERASI MUDA TEHNIK RIAU	No. Dok	PR-SMKS-12
		No. Rev	00
PROSEDUR KEPATUHAN PERATURAN UNDANGAN		Tgl	1 November 2019
		Hal	1 dari 8

PROSEDUR KEPATUHAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Dibuat oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
STAFF	HSE CORPORATE	Direktur
 GUSMARIZAL	 VHIEN SEPTI RHICIA	 FATMAWATI

	PT. GENERASI MUDA TEHNIK RIAU	No. Dok	PR-SMK3-12
		No. Rev	00
	PROSEDUR KEPATUHAN PERATURAN UNDANGAN	Tgl	1 November 2019
		Hal	2 dari 6

DAFTAR ISI

Cover.....	1
Riwayat Perubahan.....	2
Daftar Isi.....	3
1 Tujuan.....	4
2 Ruang Lingkup.....	4
3 Referensi.....	4
4 Definisi.....	4
5 Tanggung Jawab.....	5
6 Prosedur.....	6
7 Lampiran.....	7

	PT. GENERASI MUDA TEHNIK RIAU	No. Dok	PR-SMK3-12
		No. Rev	00
	PROSEDUR KEPATUHAN PERATURAN UNDANGAN	Tgl	1 November 2019
		Hal	3 dari 6

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi terhadap kepatuhan tentang Undang-undang, Peraturan dan persyaratan lainnya yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang ada pada Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang relevan dengan aktivitas di PT. GENERASI MUDA TEHNIK RIAU

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk semua bagian yang terlibat dalam proses bisnis PT. GENERASI MUDA TEHNIK RIAU baik di kantor maupun dilokasi proyek yang dikerjakan.

3. REFERENSI

- a. Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja.

4. DEFINISI

Tempat Kerja	Tempat kerja” ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya yang telah diidentifikasi oleh Perusahaan
Pengurus	Orang yang mempunyai tugas pemimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri
Pengusaha	<ol style="list-style-type: none"> a. orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha milik sendiri dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja; b. orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan sesuatu usaha bukanmiliknya dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja; c. orang atau badan hukum yang di Indonesia mewakili orang atau badan hukum termaksud pada (a) dan (b), jikalau yang diwakili berkedudukan di luar Indonesia rencana tanggap darurat.
Direktur	Pejabat yang yang bertanggungjawab untuk Pelaksanaan Undang- undang ini dan sebagai Ketua Panitia Pembina Keselamatan Kerja (P2K3)

	PT. GENERASI MUDA TEHNIK RIAU	No. Dok	PR-SMK3-12
		No. Rev	00
	PROSEDUR KEPATUHAN PERATURAN UNDANGAN	Tgl	1 November 2019
		Hal	4 dari 6

**Panitia Pembina
Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
(P2K3)**

Tim yang ditunjuk Pimpinan Perusahaan dan disertai tugas tambahan untuk mengidentifikasi sumber bahaya dan melaksanakan upaya penanggulangan keadaan darurat di unit kerja serta menjalankan Program kerja yang ditetapkan.

Undang-undang (UU)

Peraturan negara yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal pengaturan sistem pemerintahan.

Peraturan

Pemerintah (PP)

Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sehubungan dengan penjelasan dari undang-undang yang dikeluarkan.

*Keputusan Menteri
(KepMen)*

Keputusan yang dikeluarkan oleh menteri terkait sehubungan dengan suatu hal untuk mengatur sistem kerjanya.

*Peraturan Menteri
(PerMen)*

Peraturan dari menteri terkait sehubungan dengan penjelasan mengenai keputusan menteri.

Keputusan Gubernur

Peraturan yang dikeluarkan oleh gubernur daerah terkait sehubungan dengan pengaturan daerahnya.

Persyaratan lain

Peraturan yang terkait dengan proses yang dilakukan perusahaan yang berdampak pada lingkungan yang direkomendasikan oleh customer perusahaan.

5. TANGGUNG JAWAB

- a. Ahli K3 bertanggung jawab terhadap proses identifikasi (bersama dengan P2K3) dan pelaksanaan peraturan dan persyaratan lainnya yang digunakan oleh PT. GENERASI MUDA TEHNIK RIAU
- b. Divisi QHSE bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi dengan pihak terkait untuk memperoleh Undang-undang dan peraturan lainnya.
- c. Divisi QHSE bertanggung jawab mendokumentasikan Undang-undang, dan peraturan lingkungan yang diacu PT. GENERASI MUDA TEHNIK RIAU dan membuat daftar ringkasannya.
- d. Divisi QHSE bertanggung jawab untuk mensosialisasikan undang-undang dan persyaratan lainnya kepada pihak-pihak terkait.
- e. Divisi QHSE bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan selalu mengikuti perkembangan berbagai undang-undang dan peraturan mengenai lingkungan dan K3 serta memastikan bahwa undang-undang dan persyaratan tersebut masih berlaku dan diakui.

	PT. GENERASI MUDA TEHNIK RIAU	No. Dok	PR-SMK3-12
		No. Rev	00
	PROSEDUR KEPATUHAN PERATURAN UNDANGAN	Tgl	1 November 2019
		Hal	5 dari 6

6. PROSEDUR

6.1 Identifikasi Peraturan dan Perundangan yang berlaku.

Ahli K3 bersama dengan Top Management PT. GENERASI MUDA TEHNIK RIAU telah melakukan identifikasi peraturan perundangan yang berlaku dan mengakses Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Perundang-undangan dapat berupa dan tidak terbatas pada:

1. Undang Undang
2. Peraturan Pemerintah
3. Keputusan Presiden
4. Keputusan Menteri
5. Peraturan Daerah Tingkat
6. Keputusan Gubernur
7. Peraturan daerah Tingkat II
8. Peraturan Perusahaan
9. Ketentuan Asosiasi / Organisasi, Nasional, termasuk Organisasi IndukKesepakatan Internasional dan Nasi Peraturan Lokal/ Kawasan Industri

6.2 Review Peraturan dan persyaratan lainnya

6.2.1 Divisi HSE akan melakukan review terhadap isi peraturan dan persyaratan lainnya yang diterima untuk menentukan apakah peraturan dan persyaratan laninnya tersebut dapat diaplikasikan atau tidak.

6.2.2 Jika hasil review peraturan dan persyaratan lainnya dapat diaplikasikan di Perusahaan maka akan dicatat dalam rangkuman peraturan dan persyaratan lainnya.

6.2.3 Dan jika hasil review peraturan dan persyaratan lainnya tidak dapat diaplikasikan di perusahaan maka peraturan dan perundangan tersebut akan dibuang.

6.3 Distribusi dan Sosialisasi

6.3.1 Setelah teridentifikasi dan memperoleh undang-undang dan peraturan lingkungan yang diacu kemudian membuat daftar dan rangkuman dari undang-undang dan peraturan lingkungan tersebut. tentang Daftar dan rangkuman undang-undang, peraturan dan persyaratan lainnya.

6.3.1 Rangkuman undang-undang, peraturan dan persyaratan lainnya yang sudah lengkap kemudian didistribusikan dan disosialisasikan kepada seluruh pihak-pihak terkait dalam perusahaan.

6.4 Metode Akses

	PT. GENERASI MUDA TEHNIK RIAU	No. Dok	PR-SMK3-12
		No. Rev	00
	PROSEDUR KEPATUHAN PERATURAN UNDANGAN	Tgl	1 November 2019
		Hal	6 dari 6

- 6.4.1 Untuk selalu dapat meng-up date data terbaru mengenai berbagai hal yang terkait dengan kegiatan Sistem Manajemen K3, dipilih beberapa metode akses diantaranya:
- Internet
 - Surat kabar
 - Telepon / Fax
 - Buletin bisnis
 - Kunjungan/visit
 - www.peraturan.go.id
 - www.mnlh.go.id: <http://Pusatk3.com/peraturan>
 - Aplikasi Android JDIH Kemenaker
- 6.4.2 Metode tersebut akan digunakan seluruhnya atau salah satu sesuai dengan Kebutuhan.
- 6.4.3 Frekuensi kegiatannya didasarkan pada kebutuhan perusahaan dan tidak ada pembatasan.

PT. GENERASI MUDA TEHNIK RIAU telah melakukan sosialisasi terhadap perundang-undangan yang berlaku bisa melalui email atau sosialisasi melalui Meeting/ rapat.

- 6.5 Evaluasi Kepatuhan terhadap Perundang-Undangan yang berlaku**
Setelah Melakukan Identifikasi terhadap peraturan yang berlaku, PT. GENERASI MUDA TEHNIK RIAU juga melakukan evaluasi terhadap peraturan yang ditetapkan. Frekuensi Evaluasi Kepatuhan dari Perundang-undangan yang berlaku bisa dilakukan setiap satu tahun sekali.

PT. GENERASI MUDA TEHNIK RIAU juga melakukan rencana / tindak lanjut jika ada peraturan perundang undangan yang belum terpenuhi.

PT. GENERASI MUDA TEHNIK RIAU telah melakukan pengendalian catatan mengenai evaluasi terhadap kepatuhan perundang-undangan yang berlaku untuk bisa dilakukan.

7. LAMPIRAN

No	Nama Dokumen	No Dokumen	Pemilik Dokumen
1	Identifikasi dan Evaluasi Pemenuhan Persyaratan Hukum & Lainnya	F01-SMK3-012	HSE